

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, kemajuan suatu daerah dapat dinilai dari kemajuan infrastruktur, yang merupakan aspek penting dalam mempercepat proses pembangunan baik secara nasional maupun regional. Infrastruktur juga memiliki peran penting sebagai salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau wilayah tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur, yang menjadi landasan dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Marsus dkk., 2021).

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi, terdapat tiga indikator makro yang digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan, yaitu tingkat pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas harga. Kemajuan ekonomi secara makro sering tercermin dalam volume Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk menilai keberhasilan pertumbuhan ekonomi, dapat digunakan indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencakup total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Oleh karena itu, PDRB berfungsi sebagai indikator yang

relevan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat kemajuan suatu negara atau wilayah selama periode tertentu, melainkan juga sebagai dasar untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan di masa mendatang (Kansil dkk., 2023).

Tabel 1.1.
PDRB Menurut Wilayah Tahun 2022

Daerah	PDRB (%)
DKI	5,25
Jawa Barat	5,45
Jawa Tengah	5,31
DIY	5,15
Jawa Timur	5,34
Banten	5,03

Sumber : BPS

Berdasarkan pada Tabel 1.1 menunjukkan nilai PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Banten pada tahun 2022. Dapat dilihat bahwa PDRB tertinggi di Pulau Jawa tahun 2022 di pegang oleh provinsi Jawa Barat yang angkanya mencapai 5,45%. Jawa Barat meraih posisi tertinggi dalam nilai PDRB di Pulau Jawa karena adanya kombinasi faktor-faktor seperti jumlah penduduk yang besar, perkembangan sektor industri yang maju, infrastruktur yang cukup baik, menjadi pusat ekonomi dan bisnis, keberagaman ekonomi, serta dukungan aktif dari pemerintah.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi di Pulau Jawa mampu melebihi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang mencapai 5,01%. Keadaan ini menunjukkan bahwa

provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki aktivitas ekonomi yang pesat dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang, kewenangan, dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Kamilla & Hutajulu (2020) infrastruktur jalan merupakan elemen utama dalam mendukung pelaksanaan aktivitas ekonomi. Prasarana jalan yang ada memungkinkan pelaku ekonomi untuk lebih efisien dalam mendistribusikan produk-produk mereka kepada konsumen, yaitu masyarakat umum. Kualitas jalan juga memainkan peran penting dalam menentukan kecepatan proses distribusi barang kepada masyarakat.

Berikut hadits yang bisa diinterpretasikan dalam konteks Infrastruktur Jalan dan pentingnya pembangunan dan pemeliharaan jalan bagi masyarakat :

أَوْ يَعْطِفُهُ شَيْئًا طَرِيقَهُ فِي وَجَدَ مَنْ " قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ ، عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ رَوَاهُ " فَلْيُرْحَهُ يَرْفَعَهُ أَوْ ، عَلَيْهِ يَحْسَنُ

Artinya: "Barangsiapa yang menemukan sesuatu di jalan yang perlu dia perbaiki atau dia hias atau dia angkat, maka hendaknya dia melakukannya." (HR. Muslim)

Hadits ini mengajarkan pentingnya berkontribusi untuk menjaga dan memperbaiki jalan-jalan yang digunakan oleh masyarakat. Meskipun hadits

ini tidak secara khusus membahas Infrastruktur Jalan dalam konteks modern, jalan menyoroti pentingnya peran individu dalam menjaga dan memelihara fasilitas publik yang digunakan oleh banyak orang. Salah satu jenis infrastruktur yang paling umum digunakan adalah jalan. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan menyatakan bahwa jalan dianggap sebagai sarana transportasi yang memiliki peran sentral dalam perekonomian. Jalan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin, sebagai jalur distribusi barang, dan menjadi bagian integral dari sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat wilayah Republik Indonesia. Berikut merupakan data panjang jalan provinsi menurut jenis kondisi jalan di Pulau Jawa tahun 2018-2022:

Tabel 1.2.
Panjang Jalan Jenis Kondisi Jalan (km)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DKI	6679	6432	6432	6432	6432
JABAR	2361	2361	2361	2361	2361
JATENG	2405	2405	2501	2501	2501
DIY	760	783	783	783	760
JATIM	1421	1421	1421	1421	1421
BANTEN	762	762	762	762	762

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa total panjang jalan di 6 provinsi Pulau Jawa relatif stabil selama periode 5 tahun (2018-2022). Pada tahun 2019 DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi sebesar 6432km. Serta pada tahun 2022 DI Yogyakarta juga mengalami penurunan.

Tidak hanya infrastruktur jalan namun infrastruktur listrik juga memiliki peran penting. Infrastruktur listrik merupakan bagian penting dari

kehidupan yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap daya listrik yang diperlukan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti penerangan, pemanasan, pendinginan, industri, transportasi, dan lain sebagainya. Seiring dengan kemajuan suatu wilayah, permintaan akan listrik menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi, tidak hanya untuk rumah tangga tetapi juga untuk kegiatan ekonomi, terutama industri, dan berbagai aktivitas masyarakat lainnya. Tanpa adanya listrik, aktivitas produksi dapat terganggu, yang kemudian berpotensi mengurangi kuantitas hasil produksi dan berdampak pada penurunan pendapatan (Atmaja & Mahalli, 2013). Berikut ini merupakan data jumlah listrik yang terdistribusi di Pulau Jawa tahun 2018-2022:

Tabel 1.3.
Jumlah Listrik Terdistribusi (GWh)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DKI	32779.19	34107.88	32166.72	32709.30	34578.29
JABAR	52878.86	54480.28	49542.25	53318.02	56226.11
JATENG	23558.02	24750.62	25090.74	26661.16	27564.64
DIY	2856.95	2856.95	3012.45	3108.38	3326.61
JATIM	35817.90	37228.94	37613.55	39457.19	40546.88
BANTEN	23736.30	24646.11	22268.71	23830.91	26705.51

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa listrik yang didistribusikan tertinggi berada pada Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2018-2022. Serta Provinsi yang paling sedikit merupakan Provinsi Yogyakarta.

Menurut Tortajada (2014), infrastruktur air memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan, terutama pembangunan Sumber Daya

Manusia (SDM). Pembangunan SDM yang signifikan dapat memberikan kemajuan yang tidak terbatas pada produk domestik regional bruto (PDRB). Pengukuran ini merupakan strategi yang dapat diterapkan untuk perencanaan, pengelolaan, dan pembiayaan pembangunan sumber daya manusia, serta untuk pembangunan partisipatif. Penyediaan dan akses universal ke layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berikut merupakan data volume air bersih yang disalurkan di Pulau Jawa pada tahun 2018-2022:

Tabel 1.4.
Volume Air Bersih Yang Disalurkan (m³)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DKI	499301	511855	494518	495417	507981
JABAR	395581	384202	419502	413526	429705
JATENG	398425	451564	485528	511207	520152
DIY	37224	41421	47823	48303	50153
JATIM	656903	731229	721847	737083	742968
BANTEN	226883	225860	240019	236878	247608

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada Tabel 1.4 menunjukkan Provinsi Jawa Timur memiliki volume air bersih tertinggi di Pulau Jawa. Pada Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 494518 m³. Serta Provinsi yang memiliki volume air bersih paling sedikit yaitu Provinsi DI Yogyakarta.

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai pondasi kemajuan negara. Sebagai respons, pemerintah telah mengalihkan

perhatiannya ke pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jokowi menyoroti bahwa setiap negara yang maju pasti memiliki infrastruktur yang solid, dan oleh karena itu, pemerintah telah memprioritaskan pembangunan berbagai fasilitas seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dan lain sebagainya. Dalam pandangannya, pembangunan infrastruktur ini akan memudahkan aktivitas Masyarakat.

Adanya alasan mengapa infrastruktur sangat penting dalam konteks integrasi ekonomi. Pertama, keberadaan infrastruktur baru dianggap sebagai pendorong utama perkembangan ekonomi. Kedua, jaringan infrastruktur memudahkan perdagangan dan investasi bisnis. Alasan ketiga adalah bahwa peningkatan infrastruktur juga sangat krusial untuk mengatasi disparitas pembangunan ekonomi di berbagai wilayah. Infrastruktur ini terdiri dari berbagai sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui yang kasus tersebut berasal dari Kota Wuhan, China. China mengidentifikasi pneumonia tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai jenis baru coronavirus. Pernyataan “urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause” telah dikeluarkan oleh Wuhan Municipal Health Committee. Pada tahun 2020, Covid-19 menjadi sorotan utama bagi bangsa Indonesia. Pandemi ini menyebabkan banyak

kerugian yang berdampak pada perekonomian negara. Setelah lonjakan kasus terjadi dengan sangat cepat, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pandemi ini, termasuk menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Akibat diberlakukannya PSBB, semua aktivitas yang biasa dilakukan harus dihentikan sementara. Kegiatan di sektor industri dan perkantoran terpaksa dihentikan sementara. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, rumah makan, dan tempat pariwisata juga mengalami penghentian operasi sementara Yamali & Putri, (2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kamilla & Hutajulu (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur jalan memiliki dampak yang signifikan namun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, infrastruktur listrik menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai dari variabel infrastruktur listrik akan berkontribusi pada peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Namun, infrastruktur air tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki koefisien regresi negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur air tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.

Adapun penelitian yang dibuat oleh Cornelius & Primandhana, (2022), hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa variabel jalan dalam infrastruktur menunjukkan pengaruh positif, meskipun tidak signifikan, terhadap PDRB di Kota Surabaya. Ini disebabkan oleh penurunan baik dalam kuantitas maupun kualitas jalan yang digunakan oleh penduduk. Di sisi lain, variabel Infrastruktur Listrik menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kota Surabaya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan kapasitas daya listrik sudah terpenuhi untuk rumah tangga dan keperluan umum. Variabel Infrastruktur Air juga menunjukkan pengaruh positif, meskipun tidak signifikan, terhadap PDRB di Kota Surabaya. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi data distribusi air bersih menurut jenis pelanggan yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, menurut data Badan Pusat Statistik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Syahputra dkk. (2021), disimpulkan bahwa Infrastruktur Jalan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Subulussalam. Sebaliknya, Infrastruktur air menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota tersebut. Sementara itu, Infrastruktur Listrik tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Subulussalam.

Perbedaan dalam penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tempat dan waktu. Dimana penelitian terdahulu yang dilakukan pada Provinsi Jawa Tengah pada periode 2006-2018. Sedangkan

pada penelitian ini terjadi pada 6 Provinsi di Pulau Jawa dengan periode 2007 - 2022. Alasan penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa yaitu karena Pulau Jawa merupakan pulau dengan populasi terpadat di Indonesia. Tingkat keragaman ekonomi di Jawa sangat tinggi, dengan berbagai sektor ekonomi yang berkembang pesat. Pulau Jawa memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi, dengan variasi akses infrastruktur yang berbeda-beda di berbagai wilayah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis di atas, maka penulis dapat mengemukakan pokok permasalahan dalam penelitian :

1. Berapa besar pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa?
2. Berapa besar pengaruh infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa?
3. Berapa besar pengaruh infrastruktur air terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa?
4. Bagaimana pengaruh covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa?
5. Bagaimana perbedaan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruhnya infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruhnya infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruhnya infrastruktur air terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.
4. Untuk menganalisis pengaruhnya covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.
5. Untuk menganalisis perbedaan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan dari penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi pemahaman akademis yang berharga bagi mahasiswa dan juga menjadi tambahan pengetahuan serta masukan bagi penelitian – penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.

2. Manfaat Penulis

a. Bagi Penulis:

Studi ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan atau pemahaman mengenai dampak pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

b. Bagi Pembaca:

Studi ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna dan memberikan informasi yang berharga, serta memberikan motivasi untuk melakukan penelitian tentang fenomena-fenomena baru yang akan diteliti.

3. Manfaat Kebijakan:

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.